



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

PILKADA dan Permasalahannya

Refleksi Diskriminasi Jender dalam Pilkada Langsung
Sri Endah Nurhidayati

**Perjuangan dan Peran Perempuan
di DPRD Jawa Timur 2004 - 2009**
Wahidah Zein Br Siregar

Gerakan Perempuan dan Partisipasi Politik
Pinky Saptandari

**Memperbincangkan Kembali
Teori Negara Pembangun**
Kacung Marijan

**The Bottom-up Approach within Urban Poverty Alleviation
Strategies and Its Constraints**
*A Theoretical Perspective with A Special Reference
to the Indonesian Context*
Sulikah Asmorowati

**Lansia dalam Upacara Adat Batak
Mempertahankan Citra dan Jatidiri**
Meutia Farida Swasono

**Pengelolaan Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance)**
Toto Warsoko Pikir

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif

Pemimpin Umum

Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum

I. Basis Susilo

Penanggungjawab

Kris Nugroho

Dewan Redaksi

Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas'ood (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi

Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi

Harijono

Redaksi Pelaksana

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi : FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 03 1-5034015, Fax: 031-5022492

e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

PENGANTAR REDAKSI

Pada bulan-bulan ini beberapa KPUD menyelenggarakan hajatan lanjutan —setelah KPU pusat melaksanakan pemilihan langsung paket Presiden dan Wakil Presiden— yaitu mengadakan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) secara langsung. Atmosfer yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang demokratis dan langsung menyentuh masyarakat diharapkan mampu meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Sebagaimana diketahui, bahwa pada masa lalu pemilihan pimpinan daerah seringkali tidak mampu menjawab permasalahan daerah, hal ini disebabkan sosok pimpinan atau kepala daerah bukan berasal dari daerah tersebut atau bahkan masyarakat pemilih tidak tahu menahu terhadap calon pemimpinnya. Ibarat kata “bagai memilih kucing di dalam karung” idiom ini tepat untuk menggambarkan kondisi riil di daerah sebelum digulirkannya Pilkada ini.

Harapan positif dan keadaan yang makin demokratis disandarkan pada Pilkada yang ternyata pada akhirnya tidak lebih baik dari masa lalu ketika pemilihan kepala daerah berdasar pilihan partai politik yang notabene adalah amanat masyarakat. Warna-warni Pilkada turut menyadarkan kita bahwa pada hakikatnya masyarakat masih belum interest terhadap proses tersebut, apalagi pilihan masyarakat pada calonnya tidak dapat memecahkan permasalahan daerah bahkan meninggalkan masyarakat pemilihnya untuk tujuan, motif pribadi dan politik. Antusiasme pemilih dapat dilihat dengan makin maraknya prosentase golput yang kian meningkat dari berbagai daerah pemilihan, hal ini merupakan sinyal kuat bahwa Pilkada masih belum mampu memobilisasi pemilih untuk aktif, apalagi tuntutan praktis kehidupan sehari-hari masyarakat makin menghimpit serta janji-janji pada masa kampanye bakal calon pemimpin daerah kerap disalahgunakan ketika pimpinan tersebut sudah berhasil memangku jabatan yang diimpikannya.

Tulisan-tulisan yang masuk di meja redaksi pada dasarnya adalah refleksi serta evaluasi dari hasil Pilkada yang telah berlangsung, antara lain: dari sisi partisipasi gender tulisan Sri Endah Nurhidayati tentang Refleksi Diskriminasi Jender dalam Pilkada Langsung, kemudian Perjuangan dan Peran Perempuan di DPRD Jawa Timur oleh Wahidah Zein Br Siregar, disambung dengan Gerakan Perempuan dan Partisipasi Politik oleh Pinky Saptandari, dari sisi politik Kacung Marijan mengulas Teori Negara Pembangun, dari sisi administrasi The Bottom-Up Approach within Urban Poverty Alleviation Strategies and Its Constraints dikupas Sulikah Asmorowati, pada topik lain Lansia dalam Upacara Adat Batak ditulis oleh Meutia Farida Swasono, dan Pengelolaan Perusahaan yang Baik oleh Toto Warsoko Pikir

Semoga kehadiran jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini dapat memberikan alternatif pemecahan masalah sekaligus menjadi media interaksi yang dapat menjembatani para ahli, ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam mengkomunikasikan gagasan serta ide untuk pembangunan serta perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah.

Redaksi

Topik Utama Edisi No. 4 (Oktober) 2005:
Dampak Kenaikan BBM

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

Refleksi Diskriminasi Jender dalam Pilkada Langsung

Sri Endah Nurhidayati

1

Perjuangan dan Peran Perempuan di DPRD Jawa Timur

2004 - 2009

Wahidah Zein Br Siregar

13

Gerakan Perempuan dan Partisipasi Politik

Pinky Saptandari

27

Memperbincangkan Kembali Teori Negara Pembangun

Kacung Marijan

41

**The Bottom-up Approach Within Urban Poverty Alleviation
Strategies And Its Constraints**

*A Theoretical Perspective with A Special Reference
to the Indonesian Context*

Sulikah Asmorowati

53

**Lansia dalam Upacara Adat Batak
Mempertahankan Citra dan Jatidiri**

Meutia Farida Swasono

75

**Pengelolaan Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance)**

Toto Warsoko Pikir

93

PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK (*Good Corporate Governance*)

Toto Warsoko Pikir

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya

Abstract

At 21st century educator have to prepare themselves to enter and stay in their profession, the important thing is not only the development of knowledge, but also the development of themselves by taking care of their moral. All educator have to earn to position as main teacher and become peer to protege.

Keywords: *development of knowledge, moral*

Salah satu penyebab dari keterpurukan para pengusaha di Indonesia pada masa krisis ekonomi (krismon) adalah adanya kesalahan dalam tata kelola perusahaan, terutama di lakukan oleh para pemilik perusahaan. Seringkali pemilik melakukan intervensi kepada pihak manajemen tanpa memperdulikan akibat yang akan timbul, baik bagi perusahaan maupun bagi si manajemen perusahaan. Sudah banyak para manajer di masukkan dalam daftar *black list* (Daftar Orang Tercela), sehingga akan berakibat mengalami kesukaran untuk melakukan aktivitas di perusahaan manapun berada. Pemilik melakukan penekanan terhadap manajemen untuk menambah kantong pribadinya dengan berbagai cara tindakan melawan hukum yang anehnya karena dalam keadaan yang sangat terpaksa, manajemen mau melakukannya.

Pengelolaan yang Baik

Salah satu alat untuk mengelola secara benar adalah adanya prinsip yang disebut dengan *Good Corporate Governance* yang berarti “seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pihak pemegang saham”.

Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

1. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberikan informasi dengan benar dan tepat pada waktunya

- mengenai perusahaan;
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas;
 3. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antar-perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan;
 4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan;
 5. Tanggungjawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Pada prinsipnya didalam suatu perusahaan struktur umumnya terdiri dari:

1. Rapat umum pemegang saham sebagai badan tertinggi;
2. Dewan Komisaris yang mewakili pemilik untuk melakukan pengawasan;
3. Direksi sebagai pelaksana manajemen perusahaan.

Melihat struktur tersebut telah jelas bahwa masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Namun kenyataan yang ada dilapangan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan baik oleh pemilik dengan menggunakan tangan Dewan Komisaris dan Direksi. Sebetulnya sudah banyak peraturan ataupun ketentuan yang mengatur masalah *Good Corporate Governance* misalnya di Perbankan, untuk menjadi Pemilik/ Pemegang Saham, Dewan Komisaris,

Direksi maupun pejabat eksekutif harus dilakukan *Fit & Proper Test* terlebih dahulu. Bahkan pada tanggal 13 Desember 2001 Bank Indonesia telah mengeluarkan suatu Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank yang berisi penata usahaan untuk Laporan Keuangan Bank yang di publikasikan secara Bulanan yang juga menyangkut pengaturan tugas Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Bank.

Selain menyangkut masalah keuangan, dalam masalah non keuangan untuk perhitungan parameter tingkat kesehatan Bank, kinerja manajemen juga dinilai seperti apa yang ada pada CAMEL khususnya yang mengenai M-nya yaitu Manajemen. Di dalam manajemen di bedakan beberapa hal yang menyangkut:

1. Manajemen Umum:

- Strategi
- Struktur
- Sistem
- Sumber daya manusia
- Kepemimpinan
- Budaya Kerja

2. Manajemen Resiko:

- Resiko Likuiditas
- Resiko Pasar
- Resiko Kredit
- Resiko Operasional
- Resiko Hukum
- Resiko Pemilik dan Pengurus

Yang maksudnya adalah setiap orang yang mengelola Bank harus patuh dan tunduk kepada segala peraturan maupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan intern untuk

melindungi masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap Bank tersebut sehingga hubungan dananya.

Ilmu dalam Perspektif Moral

Sekarang kalau dihadapkan kepada pertanyaan untuk apa semua peraturan dan ketentuan tersebut susah-susah dibuat? dan apakah akan dilaksanakana? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita tengok kembali kepada sikap mental dari diri manusia dan khususnya kepada diri kita sendiri. Apakah akan mau melaksanakan semua ketentuan, peraturan di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, tempat sekolah/kuliah, di jalan dan lain sebagainya. Secara kodrati setiap manusia normal yang ada di dunia ini awalnya akan menolak segala sesuatu yang sifatnya mengatur dirinya. Dari penjelasan tersebut di atas ternyata ada kaitannya antara ilmu dengan moral, seperti apa yang telah menjadi pembahasan para pemikir antara lain Merton, Popper, Polanyi, Barber, Ravetz, Bridgman, Russell, Jones, Richter dan ilmuwan Indonesia misalnya Wilardjo, Daldjoeni, Slamet Imam Santoso dan Suriasumantri.

Ilmu dan moral merupakan suatu genus pengetahuan oleh karena itu mempunyai tiga komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Secara ontologi ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada daerah-daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia. Obyek penelaahan yang berada dalam batas pra-pengalaman dan pasca-pengalaman. Metafisika keilmuan berdasarkan sebagaimana adanya (*das Sein*) menyebabkan ilmu menolak premis

moral yang bersifat seharusnya (*das Sollen*) di mana keduanya tidak dapat dilepaskan. Ada 18 asas moral yang terkandung dalam kegiatan keilmuan dan 17 di antaranya bersifat *das Sollen*. Kedelapan belas asas moral tersebut adalah:

1. Bertujuan menemukan kebenaran
2. Yang dilakukan dengan penuh kejujuran
3. Tanpa kepentingan langsung tertentu
4. Berdasarkan kekuatan argumentasi
5. Mempercayai cara berfikir rasional
6. Mempercayai verifikasi argumentasi secara obyektif berdasarkan kenyataan factual
7. Mempercayai sifat kritis dalam menarik kesimpulan
8. Bersifat terbuka terhadap kritik dan kebenaran yang lain
9. Bersifat pragmatis pemilihan obyek penelaahan secara etis yang bersifat:
10. Tidak merubah kodrat manusia
11. Tidak merendahkan martabat manusia
12. Tidak mencampuri permasalahan tentang kehidupan
13. Netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik dalam menafsirkan hakekat realitas
14. Meningkatkan taraf hidup dengan memperhatikan :
15. Kodrat manusia
16. Martabat manusia
17. Komunal
18. Universal

Dalam kaidah moral ini keilmuan tidak boleh melakukan upaya untuk merubah kodrat manusia. Secara aksiologi, dalam pemilihan obyek penelaahan ilmiah maka penggunaan pengetahuan ilmiah mempunyai asas moral untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan

manusia. Dengan demikian ilmu digunakan untuk sarana dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia. Pendekatan secara *epistemologi* adalah secara operasional dalam metode ilmiah pada dasarnya merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuannya berdasarkan: (a) kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun; (b) menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran tersebut dan (c) melakukan verifikasi terhadap hipotesis termaksud untuk menguji kebenaran pernyataannya secara faktual. Secara akronim metode ilmiah terkenal sebagai *logico-hypotheco-verifikatif* atau *deducto-hypothetico-verifikatif*.

Suatu masyarakat peradaban keilmuan yang maju secara sungguh-sungguh melaksanakan asas moral yang menyangkut:

1. kebenaran
2. kejujuran
3. bebas kepentingan
4. dukungan berdasarkan kekuatan argumentasi

Agar manusia selalu melaksanakan asas moral tersebut, diperlukan suatu sanksi bagi yang melakukan ketidakjujuran misalnya, namun untuk menerapkan sanksi tersebut tidaklah gampang. Apabila setiap manusia sadar akan asas moral tersebut maka sebetulnya tidak diperlukan lagi suatu ketentuan dan peraturan yang membelenggunya.

Implikasi Moral dalam Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang secara sadar dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan dengan kejujuran yang tinggi. Pengertian tersebut sejalan dengan William R. Scott dalam bukunya *Financial Accounting Theory*. Sebagaimana tertulis pada tujuan dari buku tersebut yaitu "*implikasi yang luas dari financial accounting dari suatu kegiatan ekonomi yang fair dan efisien*". Dari pengertian kegiatan ekonomi yang fair tersebut mempunyai pengertian yang luas salah satu diantaranya seperti apa yang kami kemukakan dalam pengertian akuntansi yaitu:

1. adanya suatu kesadaran
2. adanya suatu kejujuran
3. adanya suatu efisiensi

Dan yang penting lagi adalah apa yang dilakukan tersebut selalu berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Hanya saja karena ada beberapa unsur manusia yang duduk dalam suatu perusahaan, maka masing-masing mungkin mempunyai tujuan yang berbeda. Pemilik misalnya, menginginkan untuk sesegera mungkin menerima pengembalian dana yang ditanamkan dalam perusahaan yang kadang secara sadar atau tidak sadar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan main perusahaan, sehingga posisinya bukan sebagai pemilik tetapi sebagai eksekutif atau dengan kata lain pemilik telah melakukan intervensi terhadap manajemen perusahaan. Dan apabila hal tersebut

dilakukan terus menerus, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan yang akhirnya akan kolap seperti yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kejujuran adalah suatu syarat mutlak bagi pelaku ekonomi perusahaan agar akuntansi yang dihasilkan wajar.

Salah satu contoh ketidakjujuran dalam melaksanakan suatu kegiatan ekonomi (akuntansi) adalah misalnya pengeluaran biaya fiktif, data-data fiktif untuk mendukung agar diberikan kredit oleh bank, kredit diberikan kepada pihak yang terkait dengan jumlah yang besar tanpa memperhatikan asas *Prudential Banking* dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK/LLL). Akibat dari pemberian kredit tersebut terutama kepada pihak terkait pembayaran bunga tidak lancar karena merasa masih saudara maka bunga tidak perlu dibayar dan akhirnya bank menanggung kerugian yang cukup besar bahkan ada bank yang kerugiannya sudah melebihi modalnya. Hal tersebut kembali kepada moral dan kodrat manusia menggampangkan sesuatu dan adat dari orang timur ewuh pakewuh dari manajemen untuk menolaknya karena yang memerintahkan adalah yang punya bank.

Implikasi Moral para Pendidik

Dari uraian diatas apabila diterapkan terhadap para pendidik, tidaklah banyak berbeda, yang berbeda hanyalah lingkungan, obyek dan tata kerja semata. Berbicara lingkungan, para pekerja perusahaan selalu dihadapi dengan uang, target, lembur, tidak ada kesalahan, barang akan selesai kapan, dikirim kemana, dan lain-lainnya. Bagi pendidik, salah satu yang dihadapi terutama adalah para murid anak

didik bagaimana caranya menjadi anak didik yang pintar, dan dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga nantinya akan bergaul di masyarakat luas dan banyak memberikan manfaatnya. Dalam rangka memintarkan anak didik tersebut, sebagai tenaga pendidik diberikan berbagai macam aturan main yang harus dilaksanakan. Apalagi saat ini telah memasuki abad 21 yang dikenal sebagai abad pengetahuan. Para peramal masa depan (*futurist*) mengatakan bahwa sebagai abad pengetahuan karena pengetahuan akan menjadi landasan utama segala aspek kehidupan (Trilling dan Hood, 1999). Abad pengetahuan merupakan suatu era dengan tuntutan yang lebih rumit dan menantang bagi tenaga pendidik khususnya dan kita semua umumnya. Perkembangan yang terjadi selain pada perkembangan teknologi yang sangat pesat, juga diakibatkan oleh perkembangan yang luar biasa pada ilmu pengetahuan.

Trilling dan Hood (1999) berpendapat bahwa perhatian utama pendidikan di abad 21 adalah untuk mempersiapkan hidup dan kerja bagi masyarakat. Kemerosotan pendidikan kita sudah dirasakan selama bertahun-tahun, untuk kesekian kalinya kurikulum dituding sebagai biangnya. Hal ini tercermin dari adanya upaya mengubah kurikulum mulai tahun 1975 diganti dengan kurikulum 1984, kemudian diganti lagi dengan kurikulum 1994. Nasasius (1998) mengungkapkan bahwa kemerosotan pendidikan bukan diakibatkan oleh kurikulum tetapi oleh kurangnya kemampuan profesionalisme guru dan keengganan belajar siswa. Profesionalisme sebagai penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan

tugasnya, sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu faktor internal yang meliputi minat dan bakat dan faktor eksternal yaitu berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana prasarana, serta berbagai latihan yang dilakukan guru (Sumargi, 1996). Jumlah tenaga pendidik secara kuantitatif sudah cukup banyak, tetapi mutu profesionalisme belum sesuai dengan harapan. Banyak diantaranya yang tidak berkualitas dan menyampaikan materi yang keliru sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas (Dahrin, 2000). Banyak faktor yang menyebabkan kurang profesionalismenya seorang guru, sehingga pemerintah berupaya agar guru yang tampil di abad pengetahuan adalah guru yang benar-benar profesional yang mampu mengantisipasi tantangan-tantangan dalam dunia pendidikan.

Pendidikan di Abad 21

Pendidikan di abad pengetahuan menuntut adanya manajemen pendidikan yang modern dan profesional dengan bernaung pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan diharapkan mampu mewujudkan peranannya secara efektif dengan keunggulan dalam kepemimpinan, staf, proses belajar mengajar, pengembangan staf, kurikulum, tujuan dan harapan, iklim sekolah, penilaian diri, komunikasi dan keterlibatan orang tua/masyarakat. Tidak kalah pentingnya adalah sosok penampilan guru yang ditandai dengan keunggulan dalam nasionalisme dan jiwa juang dan ketakwaan, penguasaan iptek, etos kerja

dan disiplin, profesionalisme, kerja sama dan belajar dengan berbagai disiplin, wawasan masa depan, kepastian karir, dan kesejahteraan lahir-batin, yang kesemuanya adalah implikasi dari praktek *good corporate governance*. Menurut Makagiansar (1996) memasuki abad 21 pendidikan akan mengalami pergeseran perubahan paradigma yang meliputi pergeseran paradigma:

1. Dari belajar terminal ke belajar sepanjang hayat
2. Dari belajar berfokus penguasaan pengetahuan ke belajar holistik
3. Dari citra hubungan guru-guru yang bersifat konfrontatif ke citra hubungan kemitraan
4. Dari mengajar yang menekankan pengetahuan skolastik (akademik) ke penekanan keseimbangan fokus pendidikan nilai
5. Dari kampanye melawan buta aksara ke kampanye melawan buta teknologi, budaya, dan komputer
6. Dari penampilan guru terisolasi ke penampilan dalam tim kerja
7. Dari konsentrasi eksklusif pada kompetisi ke orientasi kerja sama

Dari pendapat ahli tersebut, pendidikan pada abad 21 penuh dengan misteri dan tantangan seperti dalam cerita sinetron TV. Maister (1997) mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki ketrampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan

Kesimpulan

Pada abad 21 pendidik harus menyiapkan diri agar dapat masuk dan bertahan pada profesinya, yang penting adalah tidak hanya

pengembangan pengetahuan saja tetapi pengembangan diri dengan menjaga moral lebih diutamakan. Para pelaku pendidik harus dapat memposisikan sebagai guru utama yang menjadi panutan bagi anak didik.

Daftar Pustaka

- FCGI - Forum for Corporate Governance in Indonesia, Corporate Governance – Tata Kelola Perusahaan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V*, Buku 1A, Filsafat Ilmu (Jakarta: Universitas Terbuka, 1984/1985).
- Hasan, Ani M., *Pengembangan Profesionalisme Guru di Abad Pengetahuan*, (<http://pendidikan.network>, 2003).
- Scott, William R., *Financial Accounting Theory* (University of Waterloo: Prentice Hall International, Inc. 1997).